

# MENGAWAL RUU OMNIBUS LAW

*by* turntin.riesta@gmail.com 1

---

**Submission date:** 23-Nov-2021 11:33AM (UTC-0600)

**Submission ID:** 1711285697

**File name:** MENGAWAL\_RUU\_OMNIBUS\_LAW.pdf (62.94K)

**Word count:** 346

**Character count:** 2158

## MENGAWAL RUU OMNIBUS LAW

Oleh :

WIWIN ARIESTA, S.H., M.H.\*

*\*Dosen Universitas Merdeka Pasuruan / Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas  
Merdeka Pasuruan*

Baru-baru ini DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) telah mengesahkan secara resmi 50 (lima puluh) RUU (Rancangan Undang-Undang) untuk ditetapkan dalam Prolegnas (Program Legislasi Nasional) Prioritas tahun 2020. Empat diantaranya adalah RUU tentang Cipta Lapangan Kerja, RUU tentang Kefarmasian, RUU tentang Ibu Kota Negara serta RUU tentang RUU tentang Ketentuan dan fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian yang disebut-sebut sebagai *Omnibus Law*. Pemerintah sudah mengkonfirmasi bahwa beberapa RUU yang termasuk dalam konsep *Omnibus law* sudah ditetapkan sebagai RUU Prolegnas Prioritas 2020 yang mau tidak mau harus tuntas dan disahkan di tahun ini. *Omnibus La* sendiri merupakan suatu terobosan hukum yang biasanya di terapkan di negara-negara *Anglo Saxon* seperti Amerika yang mana berarti satu aturan hukum dibuat untuk menggantikan beberapa aturan hukum yang lama sekaligus. Beberapa pakar hukum di Indonesia percaya bahwa pendekatan *Omnibus Law* juga dapat menjadi jalan keluar/solusi atas tumpang tindihnya regulasi yang ada di Indonesia baik dalam hirarki vertikal maupun horizontal yang seringkali saling berbenturan sehingga menyulitkan pemerintah dalam mengambil kebijakan.

RUU *Omnibus Law* dalam perkembangannya memang banyak mendapat sorotan serta reaksi dari masyarakat khususnya Jawa Timur, terutama RUU Cipta Lapangan Kerja. Sebagaimana yang kita ketahui Jawa Timur merupakan salah satu propinsi dengan Upah Minimum Propinsi (UMP) yang relatif tinggi. Beberapa pihak bahkan sudah ada yang menggalang aksi menolak RUU Omnibus Law “Cilaka” karena dalam beberapa pasalnya ditengarai akan menguntungkan kaum pengusaha dan merugikan kaum pekerja. Di sisi lain Pemerintah meyakinkan bahwa RUU “Cilaka” sendiri dirancang untuk menaikkan iklim investasi di Indonesia agar mampu membuka lebih banyak lapangan kerja. Problematika bidang ketenagakerjaan di Indonesia memang masih menanggung banyak dilema dan permasalahan di beberapa sisi. RUU *Omnibus Law* sendiri saat ini masih berupa draft/konsep sehingga sebaiknya kita menunggu hasil pembahasan di DPR RI. Berharap agar kebijakan-kebijakan pemerintah tidak menindas bangsa sendiri. Mari kita tunggu, kita kawal dengan cara-cara yang baik dan pastikan pembahasan di DPR RI terkait *Omnibus Law* bisa maksimal dan menghasilkan produk hukum baru yang sejalan dengan semangat Pancasila.

# MENGAWAL RUU OMNIBUS LAW

---

## ORIGINALITY REPORT

---

8%

SIMILARITY INDEX

8%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

---

## PRIMARY SOURCES

---

1

[sehatigold.com](http://sehatigold.com)

Internet Source

3%

2

[www.dunia-energi.com](http://www.dunia-energi.com)

Internet Source

3%

3

[farmasetika.com](http://farmasetika.com)

Internet Source

2%

---

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off

# MENGAWAL RUU OMNIBUS LAW

---